

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam program P4GN oleh BNN Provinsi Jambi mencakup keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini terlihat dalam pembagian peran dan tanggung jawab di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi pengguna narkoba.

Meskipun telah terjalin kerja sama lintas sektor, implementasi *Collaborative Governance* dalam program P4GN masih menghadapi hambatan signifikan. Koordinasi yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan yang menghambat efektivitas program ini dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor penentu keberhasilan *Collaborative Governance* dalam P4GN mencakup kepemimpinan yang fasilitatif dari BNN, dukungan kebijakan yang kuat, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Namun, kegagalan sering kali dipicu oleh lemahnya sinergi antar lembaga, minimnya dukungan anggaran, dan ketidakstabilan komitmen dari beberapa pihak yang terlibat.

Untuk meningkatkan efektivitas *Collaborative Governance* dalam program P4GN, diperlukan upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia, dan memperluas keterlibatan masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang solid dan berkelanjutan, program ini dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung program kolaborasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BNN perlu memperkuat kapasitas SDM, khususnya dalam bidang sosialisasi dan rehabilitasi. Pelatihan rutin dan penambahan personel dengan kompetensi khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi publik dapat menunjang keberhasilan program P4GN.
2. Pihak BNN Provinsi Jambi, sebaiknya kolaborasi yang sudah dibangun dengan berbagai pihak terus dijaga dan ditingkatkan. Akan lebih baik kalau dibuat forum komunikasi atau koordinasi rutin, supaya semua pihak bisa saling update dan tahu perannya masing-masing dalam program P4GN.
3. Bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menambahkan alokasi anggaran dan integrasi program P4GN ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting agar program pencegahan narkoba menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggali faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan *Collaborative Governance*, seperti faktor kebijakan nasional, dinamika politik, serta peran teknologi dalam mendukung efektivitas program P4GN. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan inovasi teknologi dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba.

Dengan menerapkan saran – saran tersebut, diharapkan adanya kerja sama yang lebih solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi sosial, dan masyarakat, agar program P4GN dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi.